

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Siyash Syar'iyah dapat kita simpulkan bahwa terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Adanya kendala dan upaya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan sebagaimana hasil wawancara bahwa yang menjadi kendala yaitu kemampuan SDM yang terbatas dan cuaca yang tidak menentu. Adapun upaya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu mengajak partisipasi masyarakat dan penegakan disiplin kinerja.

Tinjauan Fiqh Siyash terkait Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur, hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW yang dikaruniai 4 sifat utama yaitu *shiddiq* yang berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. *Amanah* berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggungjawab, *Tablig* berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan *Fathanah* berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Kepala Desa Cibuntu dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan kurang bertanggungjawab terhadap peranya sebagai pemimpin pemerintah Desa. Hal ini sebagaimana terlihat dari kurang optimalnya peran kepala desa dalam menjalankan tugas, hak dan wewenang serta kewajibannya sebagai kepala pemerintahan.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian penulis sekiranya memberikan saran baik terhadap lembaga penelitian maupun kepada para pihak yang bersengketa, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan;

1. Untuk Pemerintah Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dalam pengoptimalan pembangunan infrastruktur perangkat desa harus melihat dari tiga segi yaitu jenis pembangunan yang akan dilakukan, efisiensi anggaran, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan desa demi mendapatkan kemashlahatan baik pada perangkat desa maupun kepada masyarakat setempat.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih transparansi terkait pelaksanaan dan anggaran yang dikeluarkan pada pembangunan infrastruktur desa.
3. Diharapkan kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi komunikasi dan musyawarah yang baik dalam kerjasama dengan masyarakat, karena dengan komunikasi dan musyawarah yang baik dapat membawa keterbukaan, untuk memajukan dan mengembangkan desa.

